

Manajemen Pembangunan Ekonomi Lokal Berbasis Daya Saing (Studi Kasus pada Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat)

Candra Fajri Ananda
Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang

Abstract: Significant development problems in West Papua province, e.g., Bintuni District are low regional competitiveness comparing to other districts in Indonesia in general. In fact, Bintuni District is a region with high potential natural resources, although poverty, unemployment and low economic growth contribute to high challenges of regional development. Therefore, different research objectives are stated such as analyzing on regional competitiveness and formulating local economic development based on potential competitiveness. Cluster analysis is implemented to explore the stated problems in Kaimana district, Raja Ampat, Teluk Bintuni, Sorong Selatan, Teluk Wondana, Fak Fak and Manokwari district, Sorong district and Sorong municipality. The research results show that regional competitiveness is still low comparing to other regions in West Papua province. The regional development strategy should concern on local economic development through encouraging of SME's and improving linkages between sectors.

Keywords: Competitiveness, local economic development, cluster analyzis

Pembangunan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan lainnya. Pembangunan ekonomi akan berhasil jika unsur-unsur pembangunan lainnya juga dijalankan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jika pembangunan ekonomi saja yang dijalankan maka akan timpang, atau jika pembangunan ekonomi tidak diikutsertakan dalam bagian pembangunan yang menyeluruh, maka pembangunan itu juga tidak membawa hasil yang optimal. Karena hasil pembangunan ekonomi akan menjadi modal untuk mempertahankan dan meningkatkan pembangunan lainnya.

Kondisi itulah yang memacu terwujudnya otonomi daerah. Daerah mengharapkan adanya pelimpahan wewenang untuk menjalankan roda pemerintahan maupun pelaksanaan pembangunan. Sehingga otonomi daerah mulai dijalankan semenjak tahun 1999. Tentunya dengan adanya otonomi daerah membawa konsekuensi bagi setiap daerah untuk

menjalankan aktivitas pemerintahan dan melaksanakan pembangunan.

Dengan adanya otonomi daerah tersebut, maka pembangunan ekonomi juga diharapkan bertumpu pada kemampuan dan kapasitas lokal, sehingga munculah pembangunan ekonomi lokal. Berarti pembangunan ekonomi lokal ini harus bertumpu pada kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat dan pemerintah setempat. Dengan kata lain, pemerintah lokal harus mampu menyadari dan mengidentifikasi kelemahan dan ancaman yang dihadapi, serta kekuatan dan peluang yang dimiliki. Dengan demikian maka pembangunan ekonomi ini bertumpu pada kemampuan lokal, walaupun perlu menjadi catatan pula, bahwa ketergantungan daerah terhadap pusat sampai saat ini secara umum masih besar. Namun kondisi ini diharapkan tidak menjadikan daerah berkecil hati atas kapasitas yang dimilikinya.

Dalam proses identifikasi kondisi daerah, melalui analisis lingkungan maka akan dapat diperoleh gambaran tentang kemampuan dan modal yang dimiliki daerah. Dari hal ini, nantinya akan dapat diformulasikan daya saing daerah atas lingkungannya terhadap daerah-daerah lainnya. Daya saing inilah nantinya yang digunakan sebagai modal dalam pembangunan

Alamat Korespondensi:

Candra Fajri Ananda, Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang Jl. MT Haryono Malang

ekonomi. Mengapa daya saing dijadikan modal/basis dalam pembangunan ekonomi? Karena daya saing ini merupakan salah satu basis yang dapat dijadikan fundamen dalam pembangunan, di dalam daya saing tersebut terdapat substansi keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif, sehingga pembangunan ekonomi yang dijalankan memiliki landasan yang kuat yakni daya saing, yang harapannya pembangunan ekonomi yang dijalankan tidak keropos, bertumpu pada kemampuan local, memanfaatkan kondisi internalnya, dan memiliki fundamen/landasan yang kokoh. Hal inilah yang melatarbelakangi kajian yang dilakukan.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan Pembangunan Ekonomi Lokal Berbasis Daya Saing adalah sebagai berikut: 1) Mengidentifikasi perkembangan pembangunan ekonomi lokal di Teluk Bintuni, 2) Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan ekonomi lokal, 3) Mengidentifikasi daya saing Kabupaten Teluk Bintuni, 4) Merumuskan pembangunan ekonomi lokal yang berbasis pada daya saing.

Kemakmuran nasional diciptakan, bukan diwariskan. Kemakmuran negara tidak tumbuh dari sumbangan alamiah sebuah negara. Daya saing sebuah negara tergantung pada kapasitas industrinya untuk berinovasi dan melakukan pembaharuan. Perusahaan memperoleh keunggulan terhadap para pesaing dunia yang terbaik, karena tekanan dan tantangan. Mereka mendapatkan manfaat dari memiliki pesaing domestik yang kuat, pemasok berbasis daerah asal yang agresif, dan para pelanggan lokal *demanding*. Menurut M. Porter, dalam era persaingan global saat ini, suatu bangsa atau negara yang memiliki *competitive advantage of nation* dapat bersaing di pasar internasional bila memiliki empat faktor penentu yang digambarkan sebagai suatu *diamond* berikut (Hendra: 2002).

Konsep "the four diamond" Porter ini mengajukan empat faktor yang saling terkait yang merupakan determinan keunggulan daya saing suatu bangsa, yaitu:

- strategi perusahaan, struktur dan persaingan,
- kondisi permintaan,
- kondisi faktor,
- industri terkait dan pendukung.

Teori *Hyper Competitive* Richard D'Aveni

Proses liberalisasi perdagangan dunia, baik secara regional maupun internasional yang berlangsung hingga saat ini, telah menyebabkan persaingan global yang semakin ketat, bahkan menuju kepada *hyper competitive*. Kondisi persaingan global yang seperti itu memaksa setiap negara atau perusahaan untuk memikirkan dan menemukan suatu strategi yang tepat (Hady, 2001).

Strategi yang tepat dapat berupa perencanaan dan kegiatan operasional terpadu yang mengaitkan lingkungan eksternal dan internal, sehingga dapat tercapai tujuan jangka pendek dan jangka panjang dengan disertai keberhasilan dalam mempertahankan dan meningkatkan "sustainable" *real income* secara efektif dan efisien. Strategi ini dikenal dengan "Sustainable Competitive Advantage" (SCA) yaitu keunggulan daya saing berkelanjutan.

Pembangunan Daerah dalam Lingkup Regional

Sejalan dengan konteks pembangunan disuatu negara maka daerah sebagai bagian dari subsistem yang terintegrasi secara nasional juga memiliki kontribusi terhadap pola pembangunan nasional. Jika bagian pertama dari tulisan diatas menjelaskan faktor-faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah pembentukan modal berupa investasi, baik itu yang tergolong kedalam *Stock of Physical Capital* dan *Stock of Human Capital*, maka dalam kerangka analisa pembangunan daerah, kegiatan perekonomian yang terbentuk dimana investasi mengambil tempat didalamnya merupakan bagian dari kesatuan ruang atau sistem ruang (*spatial system*).

Pembahasan selanjutnya tidak hanya terkonsentrasi pada analisa ekonomi makro akan tetapi menyangkut pula analisa ekonomi regional yang pada hakekatnya membahas kegiatan perekonomian ditinjau dari sudut penyebaran kegiatan keberbagai lokasi dalam suatu *economic space* atau ruang ekonomi tertentu (Sukirno, 1976). Mengapa pemahaman ini perlu? Azis (1993) mengemukakan beberapa alasan berkenaan dengan perbedaan pokok diantara ilmu ekonomi regional dan ilmu ekonomi konvensional, masih menurut beliau tanpa kelengkapan dari ilmu ekonomi regional, analisa formal dari ilmu ekonomi

konvensional cenderung berada dalam dunia tanpa ruang atau semacam *wonderland of no dimension*.

Perbedaan diantara keduanya tampak dalam hal dasar pemikiran, ilmu ekonomi regional seperti yang telah diuraikan sebelumnya mempunyai pemikiran dasar yang berdimensi spasial. Jarak dan lokasi merupakan hal, yang penting sehingga biaya pengangkutan memegang peranan utama dalam analisisnya. Keuntungan ekonomi yang berasal dari gejala spasial seperti penghematan karena aglomerasi (*agglomeration economies*), karena urbanisasi (*urbanization economies*) dan karena lokasi (*localization economies*) merupakan variabel yang diperhitungkan secara eksplisit. Ilmu ekonomi konvensional cenderung meremehkan berbagai unsur *spatial-juxtaposition* semacam ini (Aziz, 1993).

Wacana pembangunan berbasis sumberdaya lokal sebenarnya sudah lama muncul di kalangan pengamat pembangunan. Namun karena dinilai lambat dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi - karena memang paradigma pembangunan berorientasi pertumbuhan- maka wacana pendayagunaan sumberdaya lokal menjadi issue yang tidak populer.

Akan tetapi ketika negara mengalami krisis ekonomi, ternyata perekonomian yang ditunjang sumberdaya lokal terbukti mampu bertahan. Hal ini secara signifikan diperkuat oleh hasil penelitian pakar ekonomi Mubyarto yang menemukan pada daerah-daerah eks Program IDT ternyata tidak mengalami krisis. Artinya, jika sumberdaya lokal dikelola dengan manajemen yang baik sebagai sumberdaya pembangunan seperti pengalaman Program IDT akan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi rakyat dan daerah.

Ukuran daya saing baik untuk negara maupun daerah tidak terlalu signifikan bedanya, satu hal yang paling jelas adalah perbedaan soal wilayah administratifnya saja. Karenanya dalam membahas daya saing nantinya seperti yang dikemukakan oleh Abdullah, dkk (2002) harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- Daya saing mencakup aspek yang lebih luas daripada sekedar produktivitas atau efisiensi pada level mikro. Dengan demikian, maka lebih memungkinkan mendefinisikan daya saing sebagai "kemampuan suatu perekonomian" daripada "kemampuan sektor swasta/perusahaan".

- Pelaku ekonomi (economic agent) bukan hanya perusahaan. Akan tetapi juga rumah tangga dan pemerintah, dan lain-lain. Semuanya berada dalam sistem ekonomi yang sinergis.
- Tujuan dan hasil akhir dari meningkatnya daya saing suatu perekonomian adalah tingkat kesejahteraan penduduk dalam perekonomian tersebut. Dan ini berarti variabel lebih besar dari hanya sekedar pertumbuhan ekonomi.
- Kata kunci dari konsep daya saing adalah "kompetisi".

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan daya saing daerah diantaranya adalah:

METODE

Data yang Diperlukan

Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi: data primer dan sekunder. Jenis-jenis data primer yang diperlukan yang pada umumnya bersifat kualitatif yang diperoleh dilapangan (secara langsung maupun tidak langsung) antara lain adalah: data iklim usaha/ investasi, Isu-isu strategis di daerah dan data daya saing produk industri.

Data-data primer ini dapat diperoleh melalui *interview*, wawancara, diskusi dan pelaksanaan kegiatan Lokakarya ataupun Workshop yang melibatkan berbagai stakeholder (NGS dan GS).

Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan antara lain: Papua Barat Dalam Angka 2007; PDRB Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2007; Teluk Bintuni Dalam Angka 2007 dan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Teluk Bintuni 2007.

Metode Analisis

Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif atau statistik deduktif adalah bagian dari statistik mempelajari cara pengumpulan data dan penyajian data sehingga mudah dipahami. Statistik deskriptif hanya berhubungan dengan hal menguraikan atau memberikan keterangan-keterangan mengenai suatu data atau keadaan atau fenomena.

	Judul	<i>The Intangible Determinants Of Competitiveness And Their Measurement: The Case Of Regional Analysis</i>
1	Tujuan	Untuk mengetahui penentu daya saing dan dihubungkan dengan masalah pengukuran
	Alat	Modal sosial dan sumber daya manusia (intangible asset)
	Hasil	Modal sosial dan sumber daya manusia dalam jangka pendek dapat menentukan tingkatan pembangunan ekonomi
	Judul	<i>Urban Competitiveness Assessment In Developing Country Urban Regions: The Road Forward</i>
2	Tujuan	Untuk mengetahui daya saing wilayah kota
	Alat	Economic structure (produktivitas, output, investasi), Territorial endowment (lokasi, infrastruktur, sumber daya alam, biaya hidup, biaya menjalankan bisnis, pandangan orang kota), Human resources (skill, tingkat upah), Institutional milieu (budaya bisnis, framework kebijakan dan pemerintahan)
	Hasil	Economic structure, Territorial endowment, Human resources, Institutional milieu penting dalam menentukan daya saing ekonomi wilayah kota.

Analysis Cluster

Analisis kluster merupakan suatu teknik analisis statistik yang ditujukan untuk membuat klasifikasi individu-individu atau objek-objek ke dalam kelompok-kelompok lebih kecil yang berbeda satu dengan yang lain. Prosedur analisis kluster ini digunakan untuk mengidentifikasi kelompok kasus yang secara relatif sama yang didasarkan pada karakteristik-karakteristik yang sudah dipilih dengan menggunakan algoritma yang dapat mengatur kasus dalam jumlah besar.

Dalam penelitian ini analisis kluster (*Analysis Cluster*) dapat digunakan melihat daya saing perekonomian sektoral di Teluk Bintuni. Data akan diolah dengan software "Intercooled Stata 8.2 for Windows".

Masih berkaitan dengan analisis kluster, prosedur pengklusteran di sini menggunakan *Hierarchical*. Kemudian metode *Complete Linkage* akan dijadikan pilihan untuk menganalisis data. Tujuan dari penggunaan metode ini adalah untuk mencari kesamaan yang

paling minimum atau hubungan yang terjauh dari kelompok kluster.

HASIL

Analisis Daya Saing Teluk Bintuni

Untuk menganalisis daya saing perekonomian di Kab. Teluk Bintuni ini digunakan alat analisis kluster. Dimana dengan alat tersebut, secara kuantitatif akan dapat memberikan gambaran kelompok-kelompok yang memiliki karakter khusus. Dalam penelitian ini dibuat menjadi dua kelompok. Kelompok pertama, memiliki karakter yakni daerah-daerah yang memiliki PIDRB rendah dan hasil pertanian yang rendah pula. Sedangkan untuk kelompok kedua, karakter yang dimiliki yakni daerah-daerah yang memiliki PIDRB tinggi dan hasil pertanian yang tinggi pula.

Berikut dapat dilihat masing-masing kelompok yang telah terbagi melalui analisis kluster, antara lain: Kab. Kaimana, Raja Ampat, Teluk Bintuni, Sorong Selatan, Teluk Wondana, dan Fak Fak (Kelompok 1) dan Kab. Manokwari, Sorong, dan Kota Sorong.

Tabel 1. Pembagian daerah berdasarkan PDRB dan Hasil Pertanian

Kelompok 1	Kelompok 2
Kab. Kaimana	Kab. Manokwari
Kab. Raja Ampat	Kota Sorong
Kab. Teluk Bintuni	Kab. Sorong
Kab. Sorong Selatan	
Kab. Teluk Wondana	
Kab. Fak Fak	

(Sumber: Analisis Kluster (diolah))

Dari hasil analisis kluster di Tabel 1, dapat diketahui ternyata Kab. Teluk Bintuni ini masuk ke dalam kelompok daerah yang memiliki PDRB Rendah dan Pertanian Kurang. Hal demikian bukan berarti daya saing yang dimiliki Kab. Teluk Bintuni rendah. Sebab perbandingan daya saing antar daerah di dalam kelompok tersebut belum nampak. Akan tetapi perlu digarisbawahi, bahwasanya secara absolut daya saing untuk Kab. Teluk Bintuni (kelompok 1) dengan kabupaten dan kota di kelompok 2 memang masih kalah.

Tabel 2 menjelaskan secara lebih detail tentang bagaimana daya saing yang dimiliki oleh Kab. Teluk Bintuni dibandingkan dengan daerah lain di wilayah Papua Barat yang termasuk dalam kelompok 1. Namun sebelum menjelaskan lebih jauh tentang daya

saing tersebut, akan dijelaskan secara umum gambaran perekonomian sektoral per kelompok, dari hasil analisis kluster.

Pada kelompok satu ini terdiri dari 6 daerah, yang mana rata-rata untuk nilai PDRB nya sebesar Rp286.019 juta. Angka PDRB terendah pada kelompok ini yakni sebesar Rp. 107.393 juta dan yang tertinggi sebesar Rp. 487.292 juta. Pada sektor pertanian terdiri dari padi, hutan, sapi, dan perikanan. Rata-rata hasil produksi padi pada kelompok ini yakni sebesar 641 ton (2006). Untuk jumlah produksi hutannya rata-rata sebesar 32.036 m3 (2005). Kemudian pada produksi daging sapi, rata-rata besarnya produksi adalah 14.017 kg (2006). Produksi perikanan laut, rata-rata sebesar 3.773 ton (2005).

Selanjutnya, pada sektor industri pengolahan, banyaknya unit usaha yang ada selama tahun 2006 rata-rata sebesar 94 unit usaha. Pada sektor pertambangan, rata-rata unit usahanya yakni sebesar 17 unit usaha. Kemudian pada sektor listrik, gas, dan air, banyaknya unit usaha rata-rata sebesar 6 unit usaha. Dan banyaknya pelanggan listrik rata-rata sebesar 2.338 orang. Pada sektor konstruksi bangunan, banyaknya usaha rata-rata sebesar 37 unit usaha. Adapun pada sektor transportasi, panjang jalan yang dimiliki rata-rata 80 km. Untuk kunjungan kapal dalam pelayaran dalam negeri rata-rata sebanyak 140 unit. Dan pada sektor perhotelan, jumlah hotel yang dimiliki rata-rata sebanyak 1 unit.

Tabel 2. Hasil Analisis Kluster Kelompok 1

Kelompok 1	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
PDRB (juta Rp)	6	286,019	133,229	107,393	487,292
Padi (ton)	6	641	474	182	1,453
Hutan (m3)	6	32,036	38,962	0	101,734
Sapi (kg)	6	14,017	11,001	4,187	33,399
Perikanan (ton)	6	3,773	4,921	0	13,301
Industri (unit)	6	94	57	22	179
Pertambangan (unit)	6	17	19	1	54
Listrik, Gas, Air (unit)	6	6	5	2	16
Pelanggan Listrik (orang)	6	2,338	2,430	287	7,052
Konstruksi (unit)	6	37	37	0	82
Jalan (km)	6	80	196	0	480
Kapal (unit)	6	140	342	0	838
Hotel (unit)	6	1	3	0	8

(Sumber: Analisis Kluster (diolah))

Tabel 3. Hasil Analisis Kluster Kelompok 2

Kelompok 2	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
PDRB (juta Rp)	3	1,265,283	511,997	828,900	1,828,900
Padi (ton)	3	7,992	8,757	0	17,352
Hutan (m ³)	3	4,941	8,559	0	14,824
Sapi (kg)	3	224,914	199,316	36,864	433,851
Perikanan (ton)	3	11,372	9,775	970	20,368
Industri (unit)	3	570	465	219	1,098
Pertambangan (unit)	3	382	553	32	1,020
Listrik, Gas, Air (unit)	3	15	15	5	32
Pelanggan Listrik (orang)	3	16,403	9,141	6,143	23,678
Konstruksi (unit)	3	84	83	7	171
Jalan (km)	3	492	466	211	1,030
Kapal (unit)	3	580	615	0	1,225
Hotel (unit)	3	12	12	0	24

(Sumber: Analisis Kluster (diolah))

Pada kelompok dua ini hanya terdiri dari 3 daerah, yang mana rata-rata untuk nilai PDRB nya sebesar Rp. 1.265.283 juta. Angka ini cukup besar bila dibandingkan dengan PDRB di kelompok satu. Angka PDRB terendah pada kelompok ini yakni sebesar Rp. 828.900 juta dan yang tertinggi sebesar Rp. 1.828.900 juta. Sama seperti di kelompok satu, pada sektor pertanian juga terdiri dari padi, hutan, sapi, dan perikanan. Rata-rata hasil produksi padi pada kelompok ini yakni sebesar 7.992 ton (2006). Untuk jumlah produksi hutannya rata-rata sebesar 4.941 m³ (2005). Kemudian pada produksi daging sapi, rata-rata besarnya produksi adalah 224.914 kg (2006). Produksi perikanan laut, rata-rata sebesar 11.372 ton (2005).

Selanjutnya pada sektor industri pengolahan, banyaknya unit usaha yang ada selama tahun 2006 rata-rata sebesar 570 unit usaha. Jumlah unit usaha ini lebih besar 5 kali bila dibandingkan dengan kelompok satu. Pada sektor pertambangan, rata-rata unit usahanya yakni sebesar 382 unit usaha. Kemudian pada sektor listrik, gas, dan air, banyaknya unit usaha rata-rata sebesar 15 unit usaha. Dan banyaknya pelanggan listrik rata-rata sebesar 16.403 orang. Pada sektor konstruksi bangunan, banyaknya usaha rata-rata sebesar 84 unit usaha. Adapun pada sektor transportasi, panjang jalan yang dimiliki rata-rata 492 km. Untuk kunjungan kapal dalam pelayaran dalam negeri

rata-rata sebanyak 580 unit. Dan pada sektor perhotelan, jumlah hotel yang dimiliki rata-rata sebanyak 12 unit.

Dari kondisi perekonomian di kelompok dua ini, cukup jelas membuktikan bahwa secara absolut, perekonomian di daerah ini lebih unggul beberapa kali bila dibandingkan dengan yang di kelompok satu. Hal ini tentunya tidak lepas dari kondisi daerah yang memang menjadi pusat perekonomian di Papua Barat. Dan tentunya tiga daerah ini memiliki perkembangan yang lebih pesat bila dibandingkan dengan daerah-daerah yang ada di kelompok satu.

Selanjutnya, perbandingan daya saing perekonomian menurut sektoral antara Kab. Teluk Bintuni dengan daerah lain yang ada di kelompok satu dapat ditunjukkan pada Tabel 4. Dilihat dari sisi PDRB, besarnya PDRB Teluk Bintuni masih relatif lebih besar. Hal ini menandakan secara agregat, perekonomian di Teluk Bintuni telah mencapai taraf kesejahteraan yang lebih baik. Seperti yang kita ketahui, sebagian besar PDRB dari Teluk Bintuni disumbang oleh sektor pertanian. Dimana pada tahun 2006, sumbangan sektor ini sebesar 70,53%. Artinya sebagian besar sektor pertanian telah menjadi penopang hidup utama bagi masyarakat di Teluk Bintuni. Selanjutnya sektor industri pengolahan adalah sektor yang paling besar kedua dalam memberikan sumbangan terhadap PDRB (11,62%). Dengan demikian dua

Tabel 4. Perbandingan Daya Saing Bintuni dan Daerah Lain di Kelompok 1

Kab/Kota	Teluk Bintuni	Kelompok 1 (Rata- rata)
PDRB (juta Rp)	372,615	286,019
Padi (ton)	1,453	641
Hutan (m3)	101,734	32,036
Sapi (kg)	5,414	14,017
Perikanan (ton)	1,190	3,773
Industri (unit)	99	94
Pertambangan (unit)	21	17
Listrik, Gas, Air (unit)	4	6
Pelanggan Listrik (orang)	865	2,338
Konstruksi (unit)	36	37
Jalan (km)	0	80
Kapal (unit)	0	140
Hotel (unit)	0	1

(Sumber: Analisis Kluster (diolah))

sektor inilah yang sebenarnya memiliki peran penting dalam menentukan jalannya perekonomian di Teluk Bintuni. Karena total dari sumbangan dua sektor ini saja sudah mencapai 80 persen lebih.

Oleh karena itu, daya saing perekonomian untuk daerah Teluk Bintuni akan sangat tepat apabila ditekankan pada pengembangan di dua sektor ini, utamanya sektor pertanian. Bisa kita lihat pada tabel 4, untuk sektor pertanian, produksi padi pada tahun 2006 telah mencapai angka 1.453 ton. Nilai ini boleh dibilang fantastis, karena melebihi rata-rata dari daerah di kelompok satu secara signifikan. Sekitar dua kali lipat bila dibandingkan dengan rata-rata produksi padi yang ada di kelompok satu.

Begitu pula hasil hutannya, juga menunjukkan hasil yang baik. Dapat dilihat bahwa selama tahun 2006, hasil produksi kayu hutan mencapai angka 101.734 m³. Bila dibandingkan dengan yang ada di kelompok satu, yang rata-ratanya sebesar 32.036 m³ tentu jauh sekali, sekitar 3 kali lipatnya. Kemudian untuk hasil daging sapi dan perikanan masih kalah dengan rata-rata di kelompok satu.

Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan, daya saing untuk sektor pertanian di Teluk Bintuni yang paling baik ada di hasil pertanian padi dan hutan. Maka menjadi relevan apabila dalam jangka panjang, pengembangan hasil pertanian dua sub-sektor tadi menjadi prioritas.

Sedangkan pada sektor industri, secara umum masih cukup bagus karena sedikit unggul di atas rata-rata di kelompok satu. Dapat dilihat banyaknya unit usaha industri di Teluk Bintuni sebanyak 99 unit usaha, dan di kelompok satu rata-rata 94 unit usaha. Pengembangan industri untuk tahun-tahun ke depan memang masih perlu dilakukan. Utamanya pengembangan industri yang berbasis sektor pertanian. Karena dengan basis sektor pertanian, maka hasil produksi pertanian akan dapat diciptakan nilai tambahnya. Sehingga dengan naiknya nilai tambah di sektor pertanian, maka dapat meningkatkan PDRB secara signifikan pada tahun-tahun ke depan.

PEMBAIIASAN

Perkembangan Pembangunan Ekonomi Lokal

Perkembangan ekonomi dapat dicermati dari beberapa indikator. Salah satunya dari perkembangan PDRB dari tahun ke tahun. Pertumbuhan PDRB menurut harga konstan pada tahun 2003 sebesar 6,76% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sedangkan PDRB tahun 2004 meningkat menjadi 7,00 dan meningkat kembali meningkat menjadi 7,5% pada tahun 2005. Dengan demikian selama tiga tahun berturut-turut terjadi pertumbuhan pendapatan domestik regional bruto di Kabupaten Teluk Bintuni.

Di kabupaten Teluk Bintuni terdapat dua sektor yang dominan memiliki kontribusi terbesar terhadap PDRB, kedua sektor tersebut diantaranya adalah: Sektor Pertanian dan sektor industri pengolahan.

Permasalahan yang Dihadapi Kabupaten Teluk Bintuni. Permasalahan dan isu yang muncul di Kabupaten Teluk Bintuni terbagi atas isu umum dan isu spasial. Isu secara umum yang terdapat di Kabupaten Teluk Bintuni adalah: (1) adanya penambangan gas alam cair oleh PNG BP Tangguh, tetapi bersamaan dengan itu di Teluk Bintuni terdapat hutan mangrove terlengkap di dunia yang keberadaannya terancam rusak oleh kegiatan wilayah tersebut; (2) adanya konflik hak ulayat dalam pemanfaatan secara optimal; (3) Kabupaten Teluk Bintuni merupakan wilayah rawan bencana tsunami dan gempa ringan; (4) Kebijakan RTR Pulau Papua untuk melakukan Strategi Penyebaran Pusat Pertumbuhan (SP3).

Permasalahan secara umum yang terdapat di kabupaten teluk Bintuni adalah: (1) Potensi perkembangan kegiatan fisik/ekspansi kegiatan fisik perkotaan sebagai implikasi keberadaan gas alam cair dapat menjadi ancaman terhadap kelestarian hutan mangrove di mana keberadaan hutan mangrove (ekosistem hutan mangrove) menjadi sangat penting untuk tetap dipertahankan; (2) Keterbatasan sosialisasi dan komunikasi/informasi serta pelibatan masyarakat dalam pengelolaan/peruntukan/pemanfaatan ruang sehingga berpotensi menjadi konflik terkait dengan keberadaan hak ulayat; (3) Keterbatasan sumberdaya manusia (SDM) dan modal serta teknologi dalam pemanfaatan potensi alam yang berlimpah, sehingga mempengaruhi rendahnya optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam tersebut; (4) Wilayah yang memiliki potensi terkena dampak bencana (rawan bencana) belum memiliki langkah-langkah dalam antisipasi bencana yang akan muncul dan masih minimnya informasi yang disediakan untuk masyarakat terhadap wilayah-wilayah yang memiliki potensi bencana; dan (5) Terjadinya pemusatan kegiatan (aglomerasi) pada kota yang memiliki potensi karakteristik wilayah cepat tumbuh sebagai implikasi terhadap perkembangan perekonomian wilayah.

Sedangkan isu dan permasalahan spasial yang terdapat di Kabupaten Teluk Bintuni adalah: (1) Banyak terdapat illegal logging di kabupaten Teluk Bintuni yang banyak menimbulkan bencana

lingkungan di kemudian hari; (2) Keterbatasan sarana dan prasarana dasar bagi sebagian wilayah (transportasi, kesehatan, pendidikan, dan energy); dan (3) Pemindahan lokasi pusat pemerintahan Kabupaten Teluk Bintuni akan mempengaruhi perkembangan kawasan terbangun dan kelengkapan sarana dan prasarana sebagian besar distrik di Kabupaten Teluk Bintuni.

Membangun Daya Saing Daerah

Kesehatan

Agar tingkat kesehatan masyarakat meningkat dan terpelihara dengan baik maka kebijakan yang perlu diambil untuk meningkatkan kesehatan masyarakat diantaranya: Penyediaan dan perbaikan sarana dan prasarana kesehatan; Memperbanyak Tenaga Medis; dan Penyuluhan Kesehatan.

Pendidikan

Agar daya saing sumber daya manusia meningkat, maka tingkat pendidikan menjadi hal utama yang perlu untuk ditingkatkan kualitasnya. Adapun strategi yang perlu diambil untuk meningkatkan kualitas pendidikan Teluk Bintuni antara lain: Penyediaan gedung-gedung sekolah dan Penyediaan Tenaga Ajar.

Kesempatan Kerja

Pada bidang ini memfokuskan pada usaha mengatasi tingkat pengangguran yang masih tinggi; dan pemberdayaan tenaga kerja wanita.

Membangun Infrastruktur

Pada pembangunan infrastruktur melalui dua alternatif yakni: pembangunan akses jalan atau mengembangkan dan membangun fasilitas transportasi air.

Rumusan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Berbasis Daya Saing

Terdapat beberapa kebijakan yang dapat dilakukan. Kebijakan ini tentunya berkaitan pula dengan daya saing sektoral maupun sub sektoral yang unggul di Kabupaten Teluk Bintuni:

- Kebijakan pembangunan ekonomi lokal berbasis pada sektor pertanian; Pembangunan pada sektor pertanian ini dikembangkan dengan melakukan kebijakan:

Kebijakan SDM

- meningkatkan kemampuan dan ketrampilan petani dalam pengelolaan lahan dan produksi.
- meningkatkan etos kerja para petani.

Kebijakan Ketersediaan dan pemanfaatan lahan

- memperluas area lahan pertanian.
- mengintensifkan lahan yang telah tersedia.

Kebijakan distribusi barang.

- Kebijakan ini mesti pemerintah yang memikirkan.
- Mendorong para investor untuk memiliki kesediaan membeli produk yang dihasilkan oleh masyarakat Teluk Bintuni.

Kebijakan sarana prasarana pertanian.

- pemerintah menyediakan bibit, pupuk, obatan-obatan dan alat pertanian yang sesuai dengan kebutuhan.

• **Pembangunan Berbasis Daya Saing: Sektor Industri**

Daya saing industri di Teluk Bintuni terhadap Papua Barat dapat dilihat pada tahun 2004, jumlah unit usaha di Teluk Bintuni telah mencapai 506 unit usaha, nilai ini sekitar 0,3 kali di Papua Barat. Kemudian tenaga kerja yang dihasilkan mencapai 1.964 orang (0,3 kali di Papua Barat). Dengan jumlah unit usaha dan tenaga kerja tersebut, Teluk Bintuni mampu menghasilkan nilai Produksi sebesar Rp33,96 miliar. Nilai ini sekitar setengah dari nilai produksi yang dihasilkan di Papua Barat. Artinya secara umum, industri kecil di Teluk Bintuni memiliki daya saing yang bagus terhadap daerah lain di Papua Barat.

Pada industri besar dan menengah, Teluk Bintuni kurang dapat bersaing dengan daerah di sekitarnya, di mana unit usaha yang dimiliki masih sedikit sekali, yakni hanya 9 unit usaha. Sedangkan di Papua Barat telah mencapai jumlah 53 unit usaha. Tenaga kerja yang dihasilkan juga hanya sekitar 3.256 orang, nilai ini jauh dari jumlah tenaga kerja yang ada di Papua Barat, yakni 20.678 orang. Pada nilai produksi juga hanya menghasilkan Rp. 120,12 miliar, nilai ini hanya 0,125 kali di Papua Barat. Dengan demikian daya saing di industri besar dan menengah untuk Teluk Bintuni masih belum cukup bagus bila dibandingkan

dengan daerah di sekitarnya di Papua Barat.

• **Pembangunan Berbasis daya Saing Sektor Pertambangan**

Potensi tambang dan mineral di Kabupaten Teluk Bintuni adalah batu bara dan bahan galian lainnya, yaitu: batu gamping dan mika. Cadangan miki sebesar 150,10 juta metric ton, terdiri dari: Genis Maskovit sebanyak 19,38 juta metric ton, Genis Kuarsa 91,28 juta metric ton, dan Genis Pragmatic 31,50 juta metric ton. Kawasan pertambangan di Kabupaten Teluk Bintuni merupakan lokasi tambang granit. Hal ini merupakan salah satu potensi dalam menumbuhkembangkan Kabupaten teluk Bintuni dan dapat sebagai salah satu komoditi unggulan pendapatan daerah untuk pembiayaan pembangunan wilayah ini. Hal tersebut dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak lain seperti pihak swasta maupun dengan pihak lainnya. Dibangunnya potensi pertambangan ini akan menambah lapangan kerja bagi penduduk sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran pada usia tenaga kerja (15–54 tahun).

Minyak dan Gas Bumi. Potensi terbesar di Kabupaten Bintuni yaitu gas alam dengan cadangan 14,3 TCF. Selain itu juga terdapat potensi minyak bumi. Potensi gas alam (LNG) saat ini telah dimulai tahapan penambahan luas pertambangan gas alam cair oleh BP tangguh yang akan beroperasi tahun 2008. Pengeboran ini mengambil kawasan di lepas pantai (off-shore) dan daratan (onshore) di sekitar kawasan Teluk Bintuni, Fak-fak dan sorong Propinsi Irian Jaya Barat seperti telah diuraikan sebelumnya, eksploitasi gas bumi oleh BP Tangguh ini berpotensi menghasilkan polusi. Sebaliknya dapat pula menjadi pemicu perkembangan wilayah sekitar pertambangan. Kegiatan eksploitasi gas ala ini selain berdampak pada lingkungan, juga berdampak pada sosial, kesehatan, dan keamanan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dilihat dari perkembangan ekonominya, struktur perekonomian Kabupaten Teluk Bintuni didominasi pada sektor pertanian yang mencapai 80,13% tahun 2002 namun pada tahun-tahun berikutnya mengalami

penurunan hingga pada angka 77,26% pada tahun 2005. Berikutnya pada sector industri pengolahan sebesar 15,23 pada tahun 2002 dan berubah menjadi 16,06% pada tahun 2005. Sementara itu sektor-sektor lainnya kontribusinya relatif kecil.

Berbagai permasalahan yang cukup serius dihadapi oleh Kabupaten Teluk Bintuni dalam pembangunannya dan dalam membangun daya saingnya, antara lain kualitas Sumber daya manusia yang masih rendah, modal dan teknologi yang masih terbatas, keterbatasan infrastruktur, konflik antar masyarakat, dan permasalahan lingkungan.

Dalam membangun daya saing Kabupaten Teluk Bintuni, analisis yang dilakukan menggunakan analisis kluster untuk menentukan potensi apa saja yang memiliki daya saing di Teluk Bintuni terhadap Kabupaten di Papua Barat. Dari hasil analisis kluster, dapat diketahui bahwasanya Teluk Bintuni masuk ke dalam kelompok 1 (PDRB dan Hasil Pertanian rendah). Kemudian apabila daya saing perekonomian sektoral dari Teluk Bintuni dibandingkan dengan daerah di sekitarnya atau yang ada di dalam kelompok 1, maka dapat diketahui bahwasanya Teluk Bintuni ini unggul dalam sektor pertanian. Dari sektor pertanian tersebut, sub-sektor padi dan hutan adalah dua sub-sektor yang memiliki nilai produksi lebih besar dibandingkan dengan daerah lain atau nilainya di atas rata-rata. Maka dari itu, pengembangan sektor pertanian agar daya saing perekonomian meningkat akan relevan pada dua sub-sektor tersebut.

Selain sektor pertanian, sector industry memiliki peluang untuk dikembangkan, dan berkembangnya sector pertambangan juga memiliki prospek yang menarik bagi Kabupaten Teluk Bintuni. Hal ini dapat dicermati dari perkembangan PDRB dan kondisi empiris yang ada.

Pembangunan ekonomi lokal yang berbasis pada daya saing dengan mengupayakan kebijakan pembangunan ekonomi lokal berbasis pada sektor pertanian dan pembangunan berbasis daya saing pada sektor Industri serta pembangunan ekonomi berbasis pada sektor pertambangan.

Saran

Beberapa hal yang dapat disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni di dalam meningkatkan daya saing daerah adalah:

Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan akses pendidik dan *soft skill* masyarakat.

Peningkatan infrastruktur daerah seperti jalan, transportasi, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan infrastruktur lainnya dalam rangka mengembangkan potensi ekonomi daerah yang bertumpu pada sektor pertanian, sektor industri dan pertambangan.

DAFTAR RUJUKAN

- Agus, D.F. 2002. Analisis Dampak Ekonomi terhadap Kesenjangan Antar Wilayah di Jawa Timur, *Skripsi (S1)*, Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya, Malang
- Akita, T., dan Armida, S.A. 2002. Regional Income Inequality In Indonesia and The Initial Impact of The Economic Crisis, *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol. 38, No. 2, 2002:201-22, Januari.
- Azis, I.J. 1993, *Ilmu Ekonomi Regional dan Beberapa Aplikasinya di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Bigsten, A. 1992. Ketimpangan Kemiskinan dan Pembangunan dalam Norman Gemel (ed) *Ilmu Ekonomi Pembangunan, Beberapa Survei*, Terjemahan Nirwono. Jakarta: PT Pustaka LP3ES.
- Charles, L.J. 2001. *Introduction to Economic Growth*. New York: W.W Norton & Company Ltd.
- Dinc, M. 2002, Regional and Local Economic Analysis Tools, *Prepared for The Public Finance, Decentralization and Poverty Reduction Program*, World Bank Institute, January 2002.
- Djojohadikusumo, S. 1994. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi, Dasar Teori Ekonomi, Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: PT Pustaka LP3ES.
- Dudly, S. 1971. Arti Pembangunan, dalam *Arus Pemikiran Ekonomi Politik*, Terjemahan, Amir Effendi Siregar. Yogyakarta: Penerbit PT Tiara Wacana Yogya
- Esmara, H. 1975. Regional Income Distributions, *Bulletin of Indonesia Economic Studies*, Vol. XI, No. 1.
- Esteban, J. 2000. Regional Convergence in Europe and The Industry mix: A Shift Share Analysis, *Regional Science and Urban Economics* 30 (2000) 353-364, January.
- Glasson, J. 1977. *Pengantar Perencanaan Regional*, Terjemahan. Jakarta: Paul Sitohang, FEUI.
- Gulo, W. 2002. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Hady, H. 2001. *Ekonomi Internasional: Teori dan Kebijakan Perdagangan Internasional*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Henderson, J.V. 1988. *Urban Development: Theory, Fact, and Illusion*. New York: Oxford University Press, Inc.
- Hendra, H. 2002. *Ekonomi Internasional & Globalisasi Ekonomi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hendrik Van Den Berg. 2001. *Economic Growth and Development*. New York: Mc Graw-Hill Irwin.
- Hitt, M., et al. 2001. *Strategic Management Competitiveness and globalization Concept*. USA: Short-western College Publication.
- Jhingan. 2000. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, Terjemahan Guritno. Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada.
- Krugman, P., and Maurice, O. 1991. *Ekonomi Internasional: Teori dan Kebijakan*, Terjemahan Faisal H, Basri. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Marzuki. 1986. *Metodologi Penelitian*. Jogjakarta: BPFE UII.
- Mudrajad, K. 2002. *Analisis Spasial dan Regional: Studi Aglomerasi dan Kluster Industri Indonesia*. Yogyakarta: UPPAMPYKPN.
- Pratikto, W.A. 2005. *Menjual Pesisir dan Pulau Pulau Kecil*, Departemen Kelautan dan Perikanan RI, Jakarta.
- Sekaran, U. 1992. *Research Methods for Business: A Skill-Building Approach*. USA: John Wiley & Sons, Inc.
- Singarimbun, M., dan Sofian, E. (editor). 1995. *Metode Penelitian Survei*. Edisi revisi. Jakarta: LP3ES.
- Soepono, P. 2001. Teori Pertumbuhan Berbasis Ekonomi (ekspor): Posisi dan Sumbangannya bagi Pembendaharaan Alat-alat Analisis Regional, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Vol. 16 No. 1, 2001, 41-53 Januari.
- Sri, T.A. 1993. *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Sugiyono. 2001. *Metode Penelitian Administrasi*. Cetakan kedelapan. Bandung: CV Alfabeta.
- Suharso, T.W. 2000. *Azas Perencanaan Wilayah*, Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Brawijaya, Malang.
- Syafitri, W. 1994. *Transformasi Struktural dan Perkembangan Kemandirian Desa 1967-1987*, FE-Unibraw, Malang.
- Tambunan, T. 2004. *Globalisasi dan Perdagangan Internasional*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Todaro. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Terjemahan Haris munandar. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Utama, K. 2002. *Sebuah Analisa Mengenai Kebijakan Penciptaan: Iklim Usaha dalam Pengembangan, Ekonomi Daerah, pada Lokakarya Nasional "Pengembangan Ekonomi Daerah Melalui Sinergitas Pengembangan Kawasan"*, Jakarta, Tanggal 4-5 November 2002.
- Yusuf, W. 2001. Determinan Pertumbuhan Ekonomi Regional; Studi Empiris Antara Provinsi di Indonesia, *Jurnal Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Vol 1, No. 2 Januari 2001. Jakarta.